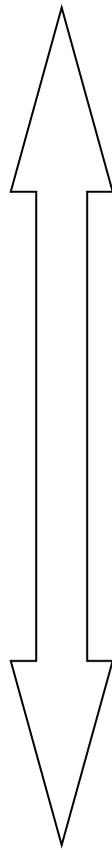


**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DOKEMEN
RENCANA KERJA
(R E N J A)**

**TAHUN 2022
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN**



TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa SKPD wajib menyusun Rencana kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Kecamatan Panekan Tahun 2022 mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2021, Renstra Kecamatan Panekan tahun 2018-2023, serta memperhatikan Renja Kecamatan Panekan Provinsi dan Bappenas. Disamping itu, penyusunan Renja ini juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sampai dengan tahun 2021 serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari parapemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten / kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan usulan-usulan yang muncul pada pelaksanaan musrenbang.

Selanjutnya Renja Kecamatan Panekan tahun 2022 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tamabhan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 611)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) iki bror

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2021 nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan nomor 115).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022; (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2021 nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan nomor 116)
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2022; (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2021 nomor 32);
14. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022; (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2021 nomor 68)

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai suatu produk perencanaan, dokumen Renja tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara fungsional Renja merupakan Renja induk yang diubah karena adanya asumsi-asumsi penganggaran dan target kinerja, penyesuaian kegiatan, maupun penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau provinsi. Penjelasan keterkaitan dokumen antara Renja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya :

1. Renja disusun dengan berpedoman pada RKPD dan Renstra yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

2. Renja disusun dengan berpedoman pada Renja induk dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja
3. Renja disusun dengan memperhatikan dan mengacu Renstra SKPD, terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja
4. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun terkait program dan kegiatan, capaian kinerja dan pagu anggaran.

Dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RKPD induk dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja
- RKPD disusun dengan memperhatikan dan mengacu Renstra SKPD, terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun terkait program dan kegiatan, capaian kinerja dan pagu anggaran
- Selanjutnya RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUPA), Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Kecamatan Panekan;
2. Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Kecamatan Panekan;
3. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Panekan Tahun 2018-2023
2. Memberikan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Panekan dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran

Restra;

1.5 Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Panekan Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

TABEL 1.1
TABEL SISTEMATIKA RKPD KEC. PANEKAN TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN		
1.1.	Latar Belakang	Dasar pertimbangan perlunya dilakukan Renja PD yang disertai dengan gambaran tentang kerangka pendanaan Daerah
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Renja PD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
1.3.	Hubungan antar Dokumen	hubungan Renja PD dengan dokumen lain yang relevan (RKPD, KUPA dan PPAS , serta Rancangan APBD) beserta penjelasannya.
1.4	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja PD.
1.5	Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunan Renja PD
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN		
2.1	Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan trubulan II	Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja PD sampai tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun sebelumnya sampai dengan Tahun berjalan sampai dengan triwulan II (kompilasi hasil capaian target kinerja Renja PD dengan target Restra PD)
2.2	Telaah terhadap hasil pelaksanaan Renja tahun berjalan	Memuat penjelasan pelaksanaan Renja PD tahun berjalan (program pelaksanaan Renja tahun berjalan, permasalahan dan solusi yang diambil)
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH		
3.1	Tujuan dan Sasaran	Memuat tujuan dan sasaran

		penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Restra Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.(juga muat target capaian IKU dan IKD sesuai Tusi/kewenangan PD,selaras dengan target di RKPD dan P-RKPD)
--	--	--

3.2	Review terhadap dokumen RKPD	Membandingkan antara P-RKPD dengan hasil analisis kebutuhan P-Renja PD terkait target capaian indikator serta nilai pagu anggaran yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan/sub kegiatan
3.3	Rancangan Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah	Memuat pergeseran/ pagu sub kegiatan, penghapusan kegiatan/subkegiatan, penambahan kegiatan/subkegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami dan yang tidak mengalami juga dicantumkan tanggal, nama Kepala Perangkat Daerah dan stempel
BAB IV PENUTUP		
Berisikan hal-hal penting lainnya dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan, juga dicantumkan tanggal, nama Kepala Perangkat Daerah dan stempel		

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD menjadi salah satu indikator substansif dalam Kebijakan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun 2022. Evaluasi dilakukan dengan mengukur capaian indikator setiap program (outcome) dan kegiatan (output) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

Realisasi Capaian indikator yang belum memenuhi target namun bersifat wajib dan merupakan prioritas daerah seperti Pelayanan Dasar, Pengembangan Ekonomi Daerah, Infrastruktur, dan Pengentasan Kemiskinan perlu penyesuaian input anggaran atau penambahan Program / kegiatan namun dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran dan sisa waktu pelaksanaan. Sebaliknya, program/kegiatan yang telah melampaui pencapaian target indikator kinerja dan bukan merupakan program /kegiatan prioritas daerah juga perlu dilakukan penyesuaian anggaran atau bahkan penghapusan program/kegiatan.

Selain penyesuaian anggaran dan penambahan / penghapusan program/kegiatan, berdasarkan evaluasi juga dapat dilakukan penyesuaian target indikator kinerja dengan memperhatikan kondisi daerah. Selanjutnya, secara lengkap evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun berjalan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun tribulan II 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (Tahun 2023)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek kepuasan masyarakat	80,35	80,42						100,6
Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	24	12						100
Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey IKM	5	1						100

Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Jumlah Penyediaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	60	12						100
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	85						94,44
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	12	6						97,22
Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan kantor yang dibeli	19	3						100
Rehabilitasi / Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan gedung kantor	1	1						87,5
Program peningkatan perencanaan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100	100						100
Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat Daerah yang disusun	50	10						100

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,65							
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	54							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah	12							
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah, jumlah survey IKM	42							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	132							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyusunan Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan	78							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	54							

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah	36							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	36							
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	36							
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	36							
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor	36							
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak penggandaan	36							
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36							
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	36							

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	36							
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	75							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	3							
Program peningkatan kelembagaan kecamatan	persentase desa dengan nilai monev terpadu minimal 80 %	60							
Fasilitasi pelayanan administrasi kewilayahan kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan Kali	100							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	80							

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan	20							
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan	20							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	80							
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wil kecamatan	30							
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wil kecamatan	30							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80							
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian, TNI, dan Instansi Vertikal	16							

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas Dengan Kepolisian TNI, dan Instansi Vertikal	16							
---	---	----	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa/Kelurahan dengan nilai Monev terpadu minimal 80	30							
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30							
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30							
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30							

KELURAHAN PANEKAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (Tahun 2022)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek kepuasan masyarakat	100	100				-	79,56	100,6
Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12				-		100
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi								
Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan kantor yang dibeli	105	2				-		100
Rehabilitasi / Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan gedung kantor	4	1				-		75

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	36							
penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	36							
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	36							
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	36							
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor	36							
penyediaan barang cetakanpenggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan penggandaan	36							
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsulatsi SKPD	36							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36							
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	36							
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	36							

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36							
---------------------------------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--

Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9							
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	6							
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	3							
Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	50							
Pembangunan Sarana dan Prasarana likal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	12							
Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kel Lembeyan kulon	3							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan								

KELURAHAN									
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan								
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun								
Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat								

Tahun 2023 merupakan tahun Kelima dari perodesasi RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, arah kebijakan Tahun 2023 diprioritaskan dalam rangka Peningkatan nilai tambah dalam rangka memperkuat daya saing produk lokal melalui penerapan inovasi teknologi. Sedangkan Kecamatan Panekan mengemban misi ke 5 yaitu Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil dengan target tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi 5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil			
Tujuan 5.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	60
Sasaran 5.1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Wilayah Kecamatan	Opini BPK	WTP
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.8
		Hasil evaluasi AKIP	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79

Sedangkan usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Panekan pada tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Magetan dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Panekan maka kedua hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Penyusunan Renja SKPD tahun 2022 tetap mengacu pada Renstra Tahun 2022, yang merupakan tahun kelima periodisasi Renstra Kecamatan Panekan tahun 2018 – 2023. Arah kebijakan Renstra yaitu:

1. Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan keuangan
2. Menyediakan jasa pelayanan administrasi perkantoran
3. Menyediakan sarana prasarana keperluan pelayanan masyarakat secara optimal.
4. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat
5. melaksanakan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa/kelurahan
6. Evaluasi desa/kelurahan melalui monev

Program dan kegiatan Prioritas dalam Renja tahun 2022 tetap mengacu pada Program Prioritas Renstra 2018 – 2023 dan Renja tahun 2022 yaitu :

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7 01 KECAMATAN

7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- 7 01 04 **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- 7 01 04 2.01 **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
- 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 7 01 06 **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
- 7 01 06 2.01 **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
- 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN PANEKAN

- 7 01 01 **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- 7 01 01 2.02 **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 7 01 01 2.06 **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7 01 01 2.07 **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 7 01 01 2.08 **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7 01 01 2.09 **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 7 01 03 **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
- 7 01 03 2.02 **Kegiatan Pemberdayaan kelurahan**
- 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan

Kebijakan prioritas yang ditetapkan dalam Renja SKPD tahun 2022 adalah penyesuaian belanja wajib dan mengikat karena adanya pergeseran anggaran tersaji dalam table berikut :

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan RKPd Kecamatan Panekan Tahun 2022 tetap mengacu pada RKPd Kecamatan Panekan tahun 2022, dan mengacu pada arah kebijakan tahun keempat dari perodesasi RPJMD 2018 – 2023, sebagaimana tercantum

dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD tahun 2018 – 2023. Arah Kebijakan Tahun keempat diprioritaskan dalam rangka Peningkatan nilai tambah dalam rangka memperkuat daya saing produk lokal melalui penerapan inovasi teknologi. Indikasi capaian dalam arah kebijakan tersebut adalah tersedianya.

Tema pembangunan dalam RKPD tahun 2022 disesuaikan dengan dinamika perkembangan kondisi ekonomi, sosial dan keamanan terkini, baik regional, nasional maupun global, sebagai respon solusi terhadap berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi. Sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah dampak pandemic COVID 19, maka tema pembangunan dalam RKPD tahun 2022 diarahkan pada peningkatan stabilitas ekonomi dan produktifitas usaha didukung penguatan sektor infrastruktur dan kepariwisataan

**PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022
BERDASARKAN RPJMD KAB. MAGETAN TAHUN 2018 – 2023**

URUSAN	TARGET TAHUN 2022		
	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pemerintahan daerah Kabupaten Kota	Program penunjang pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks kepuasan masyarakat	79,5%
Pemerintahan	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan peblik	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5%
Pemberdayaan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)	100%
Ketentraman dan ketertiban	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Presentase kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban (%)	100%
Pemerintahan Desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Presentase desa atau kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80	80 %
Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan Masyarakat	79,5%
Pemberdayaan Masyarakat	Program pemberdaraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magetan
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PANEKAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PANEKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Panekan, Panekan	79.5 Skor	12 Bulan	100 %	1,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Indeks Kepuasan Masyarakat	79.5 Skor	3,600,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Panekan, Semua Kelurahan	79.5 Skor	12 bulan	100 %	77,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Indeks Kepuasan Masyarakat	79.5 Skor	154,000,000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								66,500,000					132,500,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Magetan, Panekan, Panekan	79.5 Nilai	12 Bulan	12 bulan	17,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Indeks Kepuasan Masyarakat	79.5 Nilai	34,500,000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Magetan, Panekan, Semua Kelurahan	79.5 Nilai	12 Bulan	12 bulan	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Indeks Kepuasan Masyarakat	79.5 Nilai	8,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Magetan, Panekan, Semua Kelurahan	79.5 Nilai	12 Bulan	12 bulan	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Indeks Kepuasan Masyarakat	79.5 Nilai	90,000,000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75,000,000					150,000,000
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Kab. Magetan, Panekan, Semua Kelurahan	79.5 Nilai	36 Unit	12 bulan	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Indek Kepuasan Masyarakat	79.5 Nilai	110,000,000
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Kab. Magetan, Panekan, Semua Kelurahan	79.5 Nilai	1 unit	12 bulan	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Indek Kepuasan Masyarakat	79.5 Nilai	40,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								16,000,000					32,000,000
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								16,000,000					32,000,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas di Tingkat Kecamatan bagi Desa/Kelurahan	Kab. Magetan, Panekan, Semua Kelurahan	4 dokumen	1 Kegiatan	17 Desa/Kel	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	4 dokumen	32,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								18,500,000					37,000,000
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								18,500,000					37,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magetan
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PANEKAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PANEKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wil kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wil Kecamatan	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Nilai	12 kegiatan	12 Bulan	18,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80	80 Nilai	37,000,000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								30,000,000					60,000,000
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								30,000,000					60,000,000
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80	Jumlah Kegiatan Sinergitas Forkopimca	Jumlah kegiatan sinergitas forkompimca	Kab. Magetan, Panekan, Semua Kelurahan	80 Nilai	12 kegiatan	12 kegiatan	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80	80 Nilai	60,000,000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								20,000,000					40,000,000
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								20,000,000					40,000,000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	persentase desa atau kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Yang sesuai dengan Perundang-Undangan.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang sesuai dengan perundang-undangan	Kab. Magetan, Panekan, Semua Kelurahan	80 %	16 kegiatan	16 Desa	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		persentase desa atau kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80	80 %	40,000,000
TOTAL									1,633,042,781					4,942,455,270

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Panekan tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai akhir tahun berjalan serta rencana program dan kegiatan pada tahun 2022. Renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Panekan Tahun 2019 – 2023.

Renja Kecamatan Panekan tahun 2022 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2022. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait.

Semoga dokumen ini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program pembangunan di Kecamatan Panekan.

Panekan, Maret 2022
Camat PANEKAN



DICONG MALELEH, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19770514 199802 1 003